



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 18 Januari 2023/Periodik - 2022)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH DAERAH D.I. YOGYAKARTA
UNIT KERJA : DINAS PARIWISATA

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **SINGGIH RAHARJO**
2. Jabatan : **KEPALA DINAS**
3. NHK : **32179**

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN **Rp. 2.805.910.000**

1. Tanah dan Bangunan Seluas 232 m²/167 m² di KOTA YOGYAKARTA , WARISAN Rp. 1.100.460.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 290 m²/160 m² di KOTA YOGYAKARTA , HASIL SENDIRI Rp. 1.705.450.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN **Rp. 182.650.000**

1. LAINNYA, POLYGON SEPEDA Tahun 1900, HASIL SENDIRI Rp. 150.000
2. MOTOR, HONDA VARIO SEPEDA MOTOR Tahun 2013, HASIL SENDIRI Rp. 5.000.000
3. MOTOR, YAMAHA XMAX Tahun 2018, HASIL SENDIRI Rp. 35.000.000
4. MOBIL, HONDA JAZZ Tahun 2013, HASIL SENDIRI Rp. 100.000.000
5. MOTOR, HONDA SEPEDA MOTOR VARIO 110 Tahun 2019, HASIL SENDIRI Rp. 7.500.000
6. LAINNYA, PINARELLO SEPEDA Tahun 2019, HASIL SENDIRI Rp. 14.000.000
7. LAINNYA, BROMPTON SEPEDA LIPAT Tahun 2019, HASIL SENDIRI Rp. 18.000.000
8. LAINNYA, DOWNTUBE SEPEDA LIPAT Tahun 2017, HASIL SENDIRI Rp. 3.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA **Rp. 8.225.000**

D. SURAT BERTAHAPAN **Rp. ----**



E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	210.613.483
F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	3.207.398.483
III. HUTANG	Rp.	2.981.857
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	3.204.416.626

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.